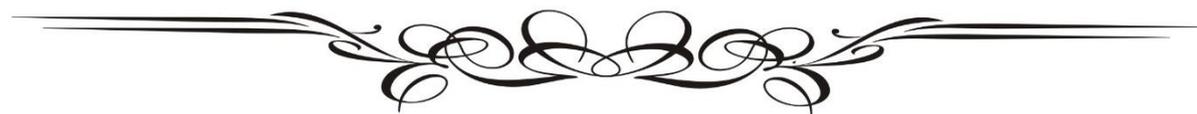


# **KLIPPING BERITA MEDIA MASSA**



**Jumat, 22 Maret 2019**



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

## **KATA PENGANTAR**

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas (halaman 4)	Jumat, 22 Maret 2019	Mengupayakan Air untuk Semua	Peringatan Hari Air Sedunia pada 22 Maret 2019 mengangkat tema yang sangat universal, "Leaving No One Behind". Tak boleh ada yang tertinggal untuk perkara akses terhadap air yang layak. Indonesia mengupayakan peningkatan tampungan dan akses air lewat sejumlah strategis. Tema "Leaving No One Behind" adalah adaptasi dari slogan utama agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Akses air bersih dan sanitasi yang layak secara khusus tercantum di dalam tujuan nomor 6 dari keseluruhan 17 tujuan.
2	Kompas (halaman 14)	Jumat, 22 Maret 2019	SDM Lengkapi Infrastruktur	Pemerintah membangun kualitas dan kapasitas sumber daya manusia untuk melengkapi pembangunan infrastruktur. Salah satunya dengan mereformasi kurikulum. Pembangunan infrastruktur terkait erat dengan isu konektivitas dan transformasi ekonomi. Kapasitas sumber daya manusia perlu dikembangkan untuk mengiringi pembangunan infrastruktur itu.
3	Kompas (halaman 19)	Jumat, 22 Maret 2019	Pembebasan Lahan Tol Medan-Binjai Tuntas	Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai di Sumatera Utara menemukan titik terang setelah pembebasan lahan dituntaskan. Ganti rugi sebagian lahan selama ini tidak dapat dilakukan karena lahan diduduki warga dan ada pihak lain yang punya sertifikat hak milik. Kini disepakati warga mendapat 70 persen dan pemilik sertifikat 30 persen dari ganti rugi lahan. Sebanyak 456 keluarga yang menduduki lahan tersebut sepakat dengan mekanisme itu. Namun, tiga dari Sembilan pemilik sertifikat atas lahan itu belum setuju dengan metode pembagian tersebut.
4	Media Indonesia (halaman 13)	Jumat, 22 Maret 2019	Pembangunan 15 Bendungan Selesai Tahun Ini	Sebanyak 15 bendungan yang tengah dalam proses pembangunan ditargetkan selesai pada akhir 2019. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 65 proyek bendungan baru yang digarap sejak 2015. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan bendungan menjadi salah satu proyek strategis karena akan meningkatkan cadangan air. Saat ini cadangan air di Indonesia, menurutnya, masih terbilang rendah, yakni hanya 11%. Karenanya, cadangan air harus terus ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan sehari-hari serta ketahanan pangan nasional.
5	Media Indonesia (halaman 13)	Jumat, 22 Maret 2019	Semua Orang Harus Mendapat Akses Air	Pemecahan masalah air tidak hanya diselesaikan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga butuh partisipasi langsung dari masyarakat, akademisi, dan swasta. Air merupakan kunci kehidupan. Tidak ada satu pun makhluk hidup di muka bumi ini yang bias hidup tanpa air. Tidak mengherankan bila pada pada setiap 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia.
6	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Jumat, 22 Maret 2019	Regulasi Bakal Ditinjau Ulang	Badan Pengatur Jalan Tol akan meninjau kembali regulasi yang mengatur tempat istirahat dan pelayanan di jalan tol. Hal itu dilakukan seiring dengan permintaan untuk menambah fungsi terminal di dalam tempat istirahat dan pelayanan atau rest area. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan bahwa BPJT sudah meminta pandangan badan usaha jalan tol (BUJT) terkait dengan penambahan fungsi tersebut.
7	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Jumat, 22 Maret 2019	Proses Uji Kompetensi Dipermudah	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional bakal menerapkan uji kompetensi jarak jauh guna meningkatkan jumlah tenaga ahli konstruksi bersertifikat. Ketua LPJK Nasional Ruslan Rivai mengatakan bahwa Lembaga tersebut bakal menggandeng perguruan tinggi untuk menyusun bank soal

				yang akan menjadi bahan uji kompetensi tenaga ahli. Proses uji kompetensi jarak jauh ini diharapkan membuat proses sertifikat tenaga ahli konstruksi lebih ringkas.
8	Bisnis Indonesia (halaman 10)	Jumat, 22 Maret 2019	Mencoba Berdamai Dengan Bencana	Letak Indonesia berada di tiga lempeng tektonik dunia dan berada di cincin api pasifik dengan 127 gunung menyebabkan tidak ada kabupaten atau kota yang bebas dari ancaman bencana dengan lebih dari 254 juta penduduk terpapar resiko bencana sedang dan tinggi. Hampir setiap tahun Indonesia mengalami bencana alam, seperti gempa bumi, erupsi, dan tsunami. Tidak hanya penanganan pascabencana yang kini diperluka. Tindakan preventif sebagai upaya untuk mengurangi korban dan kerugian pun penting untuk dilakukan.
9	Bisnis Indonesia (halaman 11)	Jumat, 22 Maret 2019	MA Tolak Permohonan PUPR	Mahkamah Agung menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Kementerian PUPR terkait dengan kewajiban pembayaran kepada PT Adhi Karya Tbk. Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Bypass Banjarmasin- Simpang Handil Bakti- Marabahan-Pelabuan Trisakti-Liang Anggang-Martapura-Desa Tungkap-Batas Kota Rantau di Kalimantan Selatan wajib melakukan pembayaran sebesar Rp27,6 miliar kepada BUMN karya itu.



Judul	<b>SDM Lengkapi Infrastruktur</b>	Tanggal	Jumat, 22 Maret 2019
Media	Kompas (halaman 14)		
Resume	Pemerintah membangun kualitas dan kapasitas sumber daya manusia untuk melengkapi pembangunan infrastruktur. Salah satunya dengan mereformasi kurikulum. Pembangunan infrastruktur terkait erat dengan isu konektivitas dan transformasi ekonomi. Kapasitas sumber daya manusia perlu dikembangkan untuk mengiringi pembangunan infrastruktur itu.		

# SDM Lengkapi Infrastruktur

Pemerintah membangun kualitas dan kapasitas sumber daya manusia untuk melengkapi pembangunan infrastruktur. Salah satunya dengan mereformasi kurikulum.

**TANGERANG, KOMPAS** — Pembangunan infrastruktur terkait erat dengan isu konektivitas dan transformasi ekonomi. Kapasitas sumber daya manusia perlu dikembangkan untuk mengiringi pembangunan infrastruktur itu.

“Setelah fokus selama 5 tahun dalam membangun infrastruktur, Indonesia ingin melengkapinya dengan pembangunan kapasitas sumber daya manusia,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pada pembukaan Pekan SDM Ahli Konstruksi Indonesia, Indobuildtech, dan Temu Karya Ilmiah 2019 di ICE, BSD, Tangerang, Banten, Kamis (21/3/2019).

Menurut Darmin, pembangunan infrastruktur dibutuhkan sebagai basis atau dasar untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di berbagai wilayah, termasuk di lokasi terpencil.

“Barangkali di daerah itu sudah ada kegiatan ekonomi,

tetapi hanya ala kadarnya karena jauh dari pasar. Infrastruktur semakin mendekatkan kegiatan ekonomi dengan pasar,” ujar Darmin.

Kemampuan mengakses pasar akan membantu masyarakat mengintensifkan kegiatan ekonomi untuk menopang kehidupan keluarga.

Darmin mengatakan, pemerintah memiliki konsep pembangunan kualitas SDM yang mulai dikerjakan pada 2020. Konsep terdiri atas beberapa lapisan, termasuk tataran pelatihan, sekolah menengah kejuruan, dan politeknik.

“Mulai tahun ini, kita harus menyiapkan reformasi kurikulum, baik di SMK maupun berbagai pelatihan, balai latihan kerja, dan sebagainya. Langkah ini agar ada kecocokan antara hal yang diajarkan dan yang diperlukan dalam dunia kerja,” ujar Darmin.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan

Kawasan Ekonomi Kamar Dagang dan Industri Indonesia Sanny Iskandar menyampaikan, salah satu persoalan yang dihadapi daerah adalah belum ada rencana detail tata ruang. Persoalan ini juga dikemukakan di dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019, beberapa waktu lalu.

## Investasi

Terkait infrastruktur jalan tol, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, Kamis (21/3) di Jakarta, mengatakan, kebutuhan investasi jalan tol di Indonesia terus meningkat. Karena itu, selain memperhitungkan lalu lintas kendaraan, pendapatan nontarif menjadi peluang pemasukan bagi investor jalan tol.

Potensi untuk menggali pendapatan nontarif tersebut sedang dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam perjanjian perusahaan jalan tol.

(CAS/NAD)

Judul	<b>Pembebasan Lahan Tol Medan-Binjai Tuntas</b>	Tanggal	Jumat, 22 Maret 2019
Media	Kompas (halaman 19)		
Resume	Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai di Sumatera Utara menemukan titik terang setelah pembebasan lahan dituntaskan. Ganti rugi sebagian lahan selama ini tidak dapat dilakukan karena lahan diduduki warga dan ada pihak lain yang punya sertifikat hak milik. Kini disepakati warga mendapat 70 persen dan pemilik sertifikat 30 persen dari ganti rugi lahan. Sebanyak 456 keluarga yang menduduki lahan tersebut sepakat dengan mekanisme itu. Namun, tiga dari Sembilan pemilik sertifikat atas lahan itu belum setuju dengan metode pembagian tersebut.		

## INFRASTRUKTUR

# Pembebasan Lahan Tol Medan-Binjai Tuntas

**MEDAN, KOMPAS** — Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai di Sumatera Utara menemukan titik terang setelah pembebasan lahan dituntaskan. Ganti rugi sebagian lahan selama ini tidak dapat dilakukan karena lahan diduduki warga dan ada pihak lain yang punya sertifikat hak milik. Kini disepakati warga mendapat 70 persen dan pemilik sertifikat 30 persen dari ganti rugi lahan.

Sebanyak 456 keluarga yang menduduki lahan tersebut sepakat dengan mekanisme itu. Namun, tiga dari sembilan pemilik sertifikat atas lahan itu belum setuju dengan metode pembagian tersebut.

”Bagi pihak yang tidak sepakat dengan mekanisme ini, kami akan titipkan uang konsinyasi ke pengadilan,” kata Ketua Pengadaan Lahan yang juga Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Bambang Priono saat menghadiri pembayaran ganti rugi kepada sebagian warga di Medan, Kamis (21/3/2019).

Untuk tahap pertama, pemerintah melakukan pembayaran kepada 52 keluarga. Pembayaran untuk warga lain dan pihak yang memiliki sertifikat ditargetkan tuntas dalam satu bulan ke depan karena menunggu kelengkapan administrasi.

Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai 16,8 kilometer dimulai sejak 2015. Sepanjang 10,46 km di antaranya, yakni dari Gerbang Tol Helvetia sampai Gerbang Tol Binjai, sudah beroperasi sejak 2017. Namun, 6 kilometer lainnya belum tersambung karena terkendala pembebasan lahan 1,5 km di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir. Padahal, sambungan tol itu menghubungkan Tol Medan-Binjai dengan ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa sepanjang 34 km dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 61,8 km. Jika sudah tersambung, Tol Medan-Binjai akan terhubung ke Kota Medan, Pelabuhan Belawan, Bandara Kualanamu, hingga Kota Tebing Tinggi.

Pimpinan Proyek Tol Medan-Binjai PT Hutama Karya Hestu Budi mengatakan, pihaknya akan memulai pekerjaan konstruksi di lahan itu pada April ini setelah warga menerima ganti rugi dan mengosongkan rumah. ”Kami targetkan akhir tahun ini Tol Medan-Binjai beroperasi penuh,” katanya.

Sementara itu, di Jawa Barat, konektivitas wilayah bagian selatan akan ditingkatkan dengan membangun jalan jalur tengah selatan. Peningkatan konektivitas diharapkan mengikis ketimpangan pembangunan di kawasan itu. (NSA/TAM)

Judul	<b>Pembangunan 15 Bendungan Selesai Tahun Ini</b>	Tanggal	Jumat, 22 Maret 2019
Media	Media Indonesia (halaman 13)		
Resume	Sebanyak 15 bendungan yang tengah dalam proses pembangunan ditargetkan selesai pada akhir 2019. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 65 proyek bendungan baru yang digarap sejak 2015. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan bendungan menjadi salah satu proyek strategis karena akan meningkatkan cadangan air. Saat ini cadangan air di Indonesia, menurutnya, masih terbilang rendah, yakni hanya 11%. Karenanya, cadangan air harus terus ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan sehari-hari serta ketahanan pangan nasional.		



ANTARA-ADITYA PRADANA PUTRA

**PENGENDALI BANJIR KOTA:** Foto udara suasana Waduk Jatibarang di Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Waduk seluas 189 hektare tersebut berfungsi sebagai pengendali banjir kota serta penyedia bahan baku air bersih di Kota Semarang.

## Pembangunan 15 Bendungan Selesai Tahun Ini

SEBANYAK 15 bendungan yang tengah dalam proses pembangunan ditargetkan selesai pada akhir 2019. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 65 proyek bendungan baru yang digarap sejak 2015.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan bendungan menjadi salah satu proyek strategis karena akan meningkatkan cadangan air. Saat ini cadangan air di Indonesia, menurutnya, masih terbilang rendah, yakni hanya 11%. Karenanya, cadangan air harus terus ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan sehari-hari serta ketahanan pangan nasional.

Selama periode pemerintahan Jokowi-JK, terdapat 49 bendungan baru yang diproyeksikan untuk dibangun. Selain itu, pemerintah juga melanjutkan pendirian 16 bendungan yang belum terealisasi pada masa pemerintahan sebelumnya.

Jadi, total keseluruhan ada 65 bendungan dengan nilai mencapai Rp82,5 triliun yang seluruhnya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga 2018, sebanyak 55 sudah masuk tahap konstruksi dan 14 di antara mereka sudah selesai.

"Insy Allah tahun ini akan diselesaikan lagi 15 bendungan. Dengan demikian, sampai akhir 2019 akan ada 29 bendungan yang rampung," ujar Basuki melalui keterangan resmi, kemarin.

Pada tahun ini pula, 10 bendungan

tersisa akan memasuki tahap pengerjaan.

Sebanyak 14 bendungan yang rampung meliputi Bendungan Rajui (Aceh), Jatigede (Jawa Barat), Bajulmati, Nipah (Jawa Timur), Titab (Bali), Paya Seunara (Aceh), Teritip (Kalimantan Timur), Raknamo, Mila, Rotikod (NTT), Tanju (NTB), Logung (Jawa Tengah), Sei Gong (Kepri), dan Sindangheula (Banten).

Bendungan baru yang selesai pada akhir tahun ini meliputi Bendungan Gongseng, Karalloe, Tapin, Passeloreng, Bintang Bano, Way Sekampung, Ladongi, Napun Gete, Ciawi, Sukamahi, Karian, Keureuto, Gondang, Marangkayu, dan Kuningan.

Basuki menjelaskan pembangunan bendungan tidak dapat selesai dalam waktu singkat karena harus melalui banyak tahapan rumit. Proyek infrastruktur itu juga harus dikerjakan dengan sangat hati-hati.

Secara rata-rata, pembangunan bendungan membutuhkan waktu tiga hingga lima tahun. Karenanya, program pembangunan 65 bendungan baru akan rampung seluruhnya pada 2023.

Pengoperasian 65 bendungan akan menambah luas lahan pertanian yang mendapat suplai irigasi premium atau irigasi dari air bendungan menjadi 19%-20%. "Sebanyak 29 bendungan yang selesai hingga tahun ini akan memberikan pasokan air 2,15 miliar kubik untuk 258.902 hektare lahan," tuturnya. (Pra/S-4)

Judul	<b>Semua Orang Harus Mendapat Akses Air</b>	Tanggal	Jumat, 22 Maret 2019
Media	Media Indonesia (halaman 13)		
Resume	Pemecahan masalah air tidak hanya diselesaikan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga butuh partisipasi langsung dari masyarakat, akademisi, dan swasta. Air merupakan kunci kehidupan. Tidak ada satu pun makhluk hidup di muka bumi ini yang bias hidup tanpa air. Tidak mengherankan bila pada pada setiap 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia.		

# Semua Orang Harus Mendapat Akses Air

*Pemecahan masalah air tidak hanya diselesaikan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga butuh partisipasi langsung dari masyarakat, akademisi, dan swasta.*

**HAUFAN HASYIM SALENGKE**  
[haufan\\_hasyim@mediaindonesia.com](mailto:haufan_hasyim@mediaindonesia.com)

**A**IR merupakan kunci kehidupan. Tidak ada satu pun makhluk hidup di muka bumi ini yang bisa hidup tanpa air. Tidak mengherankan bila pada setiap 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia.

Perayaan itu untuk mengingatkan masyarakat dunia tentang pentingnya air bagi kehidupan dan menyadarkan pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan. Perayaan Hari Air Sedunia pada tahun ini mengambil tema *Leaving no one behind* yang diadaptasi dalam tema *Indonesia semua harus mendapatkan akses air*.

Sampai saat ini masih banyak masyarakat dunia yang hidup tanpa akses air bersih. Berdasarkan laporan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-bangsa (UNICEF) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), hampir 1 miliar orang saat ini hidup tanpa akses ke air minum bersih.

Bahkan, berdasarkan laporan organisasi nirlaba WaterAid, secara global hampir 4 miliar orang tinggal di daerah yang kekurangan

air membutuhkan permintaan melebihi pasokan air.

Bila tidak ditanggulangi, jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi 5 miliar orang pada 2050. Hal itu berdasarkan laporan berjudul *Beneath the Surface: The State of the World's Water 2019*, yang dirilis untuk memperingati Hari Air Sedunia tahun ini.

Bagaimana halnya dengan Indonesia? Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional Badan Pusat Statistik 2017 menyebutkan baru 72,04 rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Indonesia. Itu artinya masih ada 28% rumah tangga di Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang tidak layak.

Untuk itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam rangka Hari Air Sedunia, semua orang harus mendapatkan akses air bersih. Ia pun mengajak generasi milenial untuk turut berperan aktif menjaga lingkungan dan air.

"Kalau lingkungan dan air dirawat dengan tidak baik bisa menjadi 'musuh', tetapi kalau dirawat dengan

baik akan menjadi 'kawan'," ujar Menteri Basuki saat membuka Water Day Fest ke-27 Tahun 2019 di Gedung Kementerian PU-Pera, Jakarta, Selasa (19/3).

Menteri Basuki mengingatkan, peristiwa banjir bandang di Sentani, Papua, baru-baru ini yang mengakibatkan korban jiwa dan ribuan orang mengungsi, salah satu penyebabnya ialah perilaku dari manusia.

"Banyak terjadi bencana terkait dengan hidrometeorologi disebabkan lingkungan dan air. Anak muda yang punya inovasi dan kreativitas bagus jangan lupa untuk menjaga lingkungan dan air."

Terjadinya kekurangan air pada musim kemarau dan kelebihan air pada musim hujan dan bencana terkait dengan hidrometeorologi serta rendahnya kualitas air akibat pencemaran menjadi tantangan yang perlu diatasi bersama oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

## Pemenuhan akses

Di sisi lain, Staf Khusus Menteri PU-Pera Bidang Air dan Sumber Daya Air Firdaus Ali mengatakan, target pemenuhan akses masyarakat terhadap air

# Kondisi Air di Indonesia

Indeks Ketersediaan Air (IKA) 2017 (m3/kapita)



< 1.000 : sangat kurang | 1.000- 5.000: kurang | 5.000- 10.000 : menengah | > 10.000 : tinggi

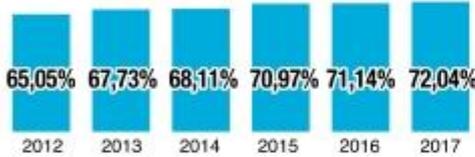
Indonesia proyeksi



keterangan:  
Kategori IKA yang dianut dunia (m3/kapita/tahun)

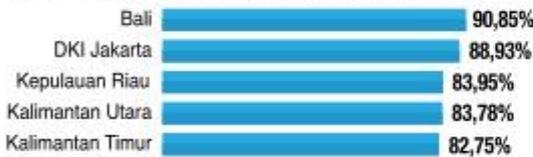
## Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak di Indonesia

(Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional, BPS)



## 5 Provinsi dengan Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak Tertinggi 2017

(Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional, BPS)

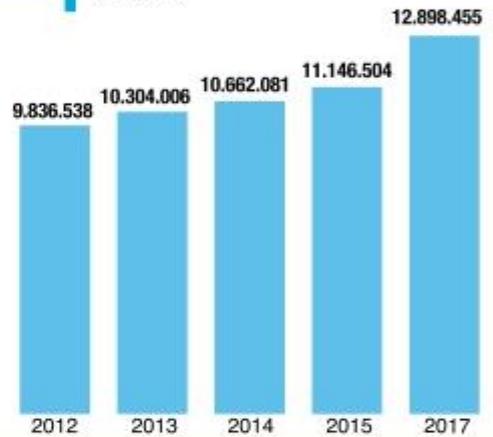


## 5 Provinsi dengan Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak Terendah 2017

(Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional, BPS)



## Jumlah Air Bersih yang Disalurkan Perusahaan Air Bersih di Indonesia (ribu m3)



Sumber: Kementerian PU/PR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/BPS/Tim MI

bersih dilakukan pemerintah melalui perpipaan dan nonperpipaan.

Untuk perpipaan, pemenuhan secara nasional baru 29%. Dari persentase itu, sebagian besar masyarakat perkotaan yang mendapatkan akses air minum melalui perpipaan.

Sisanya, yakni 71% masyarakat mendapatkan akses air bersih dari nonperpipaan berupa sumur (sumur dangkal dan sumur dalam). Dalam kategori ini, kata Firdaus, sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan sumur dangkal yang rentan terkontaminasi.

Rendahnya cakupan air bersih perpipaan nasional, lanjutnya, terkendala minimnya infrastruktur. Itu terjadi lantaran jumlah bendungan untuk penyediaan air bersih belum memenuhi persyaratan sebagai sebuah negara besar.

Indonesia yang berpenduduk sekitar 262 juta jiwa dan nomor empat terbesar di dunia hanya memiliki 65 bendungan. Jumlah itu belum sepadan dengan jumlah penduduk Indonesia. Firdaus mencontohkan, Jepang yang hanya berpenduduk 130 juta jiwa memiliki hampir 3.000 bendungan. Lalu, Amerika

Serikat yang berpenduduk 327 juta jiwa memiliki 6.000 bendungan.

Selain jumlahnya tidak memenuhi syarat, kapasitas reservoirnya pun tidak sebanding. Indonesia hanya memiliki bendungan berkapasitas reservoir 53 meter kubik per kapita per tahun. Bandingkan dengan bendungan Thailand yang mampu menampung air dengan kapasitas reservoir yang jika dibagi dengan jumlah penduduknya rata-rata per tahun ialah 1.200 meter kubik per kapita per tahun.

“Dengan kondisi itu Thailand bisa surplus

pangan, sedangkan kita memiliki neraca air yang tidak *balance*. Ketika musim kemarau kita membutuhkan air karena reservoir tidak cukup, tetapi ketika musim hujan, air melimpah ruah dan berubah menjadi banjir dan bencana.”

Terkait dengan hal itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU-Pera Hari Suprayogi mengatakan, pemecahan masalah air tidak hanya diselesaikan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga butuh partisipasi langsung dari masyarakat, akademisi, dan swasta. (Hym/S-2)

Judul	Regulasi Bakal Ditinjau Ulang	Tanggal	Jumat, 22 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	Badan Pengatur Jalan Tol akan meninjau kembali regulasi yang mengatur tempat istirahat dan pelayanan di jalan tol. Hal itu dilakukan seiring dengan permintaan untuk menambah fungsi terminal di dalam tempat istirahat dan pelayanan atau rest area. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan bahwa BPJT sudah meminta pandangan badan usaha jalan tol (BUJT) terkait dengan penambahan fungsi tersebut.		

► **TERMINAL DI REST AREA**

# Regulasi Bakal Ditinjau Ulang

Bisnis, PAMULANG — Badan Pengatur Jalan Tol akan meninjau kembali regulasi yang mengatur tempat istirahat dan pelayanan di jalan tol. Hal itu dilakukan seiring dengan permintaan untuk menambah fungsi terminal di dalam tempat istirahat dan pelayanan atau rest area.



Rivki Maulana  
rivki.maulana@bisnis.com

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan bahwa BPJT sudah meminta pandangan badan usaha jalan tol (BUJT) terkait dengan penambahan fungsi tersebut.

BUJT memberi pendapat yang beragam. Ada yang mendukung dan ada juga yang tidak mendukung.

"Sekarang kami telah dulu aspek exit [pintu keluar] dari TIP [tempat istirahat dan pelayanan]. Yang jelas, kami tidak mengizinkan ada akses di luar jalan tol ke TIP. Jadi, perlu ada feeder ke luar jalan tol nantinya," jelas Danang kepada Bisnis saat ditemui di Tangerang Selatan, Kamis (21/3).

Regulasi yang mengatur TIP saat ini adalah Peraturan Menteri PUPR No. 10/PRT/M/2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol. Peraturan itu tidak mengakomodasi keberadaan terminal di dalam TIP.

Oleh karena itu, Danang mengusulkan

► **Kemenhub juga belum mengajukan permintaan untuk mengakomodasi penambahan fungsi terminal di dalam TIP.**

supaya pembahasan regulasi menyangkut penambahan fungsi terminal di dalam TIP melibatkan antarkementerian.

Dia mengungkapkan bahwa secara formal, Kementerian Perhubungan juga belum mengajukan permintaan untuk mengakomodasi penambahan fungsi terminal di dalam TIP. Namun, secara informal, diskusi terkait dengan hal tersebut sudah berlangsung.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kemenhub sudah memberi gambaran lokasi yang bisa digunakan untuk penambahan fungsi terminal di dalam TIP. Ketiga lokasi itu yakni Tegal, Semarang, dan Solo.

Ide penambahan fungsi terminal pada TIP berasal dari Kemenhub. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi sebelumnya mengatakan bahwa kementerian

terbakal menggodok gagasan ini agar operator bus bisa memanfaatkan TIP di jalan tol Trans-Jawa sebagai terminal.

Secara teknis, penyediaan terminal di dalam TIP dimungkinkan.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyantanto sebelumnya mengatakan bahwa fungsi terminal tidak terputus jauh dengan area parkir. Namun, pergerakan kendaraan di terminal harus menyesuaikan dengan kapasitas TIP dan tidak melampaui durasi parkir.

"Sifat parkir kan sama dengan terminal, tetapi bukan berarti dia [pengendara] bisa berlama-lama, dia hanya singgah saja.

Ini ada aturannya," jelasnya.

**BELUM ADA GAMBARAN**

Beberapa waktu lalu, Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiakto mengatakan bahwa perusahaan belum melakukan pembahasan dengan Kementerian PUPR maupun Kemenhub terkait dengan wacana penyediaan terminal di dalam TIP.

"Belum ada pembahasan dan belum ada bayangan sama sekali seperti apa," ujarnya.

PT Waskita Toll Road menjadi salah satu pemilik konsesi jalan tol dengan

panjang yang signifikan di koridor Trans-Jawa. Anak usaha PT Waskita Karya Tbk. tersebut sedikitnya berpartisipasi di lima badan usaha jalan tol di lima ruas, yaitu Kanci—Pejagan, Pejagan—Pemalang, Pemalang—Batang, Batang—Semarang, dan Pasuruan—Probolinggo.

Herwidiakto menegaskan bahwa fungsi terminal membuat pengelola terminal perlu menyediakan akses keluar tol bagi penumpang yang turun di TIP, maupun yang akan naik di TIP.

Menurutnya, ide penambahan seperti terminal pernah diajukan oleh salah satu perusahaan otobus (PO) yaitu Agra Mas.

Menurut Herwidiakto, Agra Mas sempat mengajukan diri untuk mengelola restoran dan stasiun pengisian bahan bakar umum di salah satu ruas yang dikelola perusahaannya. Namun, saat itu, Agra Mas hanya mengajukan area untuk pool bus armadanya, bukan terminal. Penajakan tersebut tidak masuk kesepakatan karena tidak diatur dalam regulasi.

Pada kesempatan berbeda, Astra Infra juga menunggu kepastian regulasi terkait dengan wacana penyediaan terminal di TIP.

CED Toll Road Group Business Astra Infra Widiwik D. Santoso mengatakan bahwa perusahaan sangat ketat dalam kepatuhan terhadap regulasi.

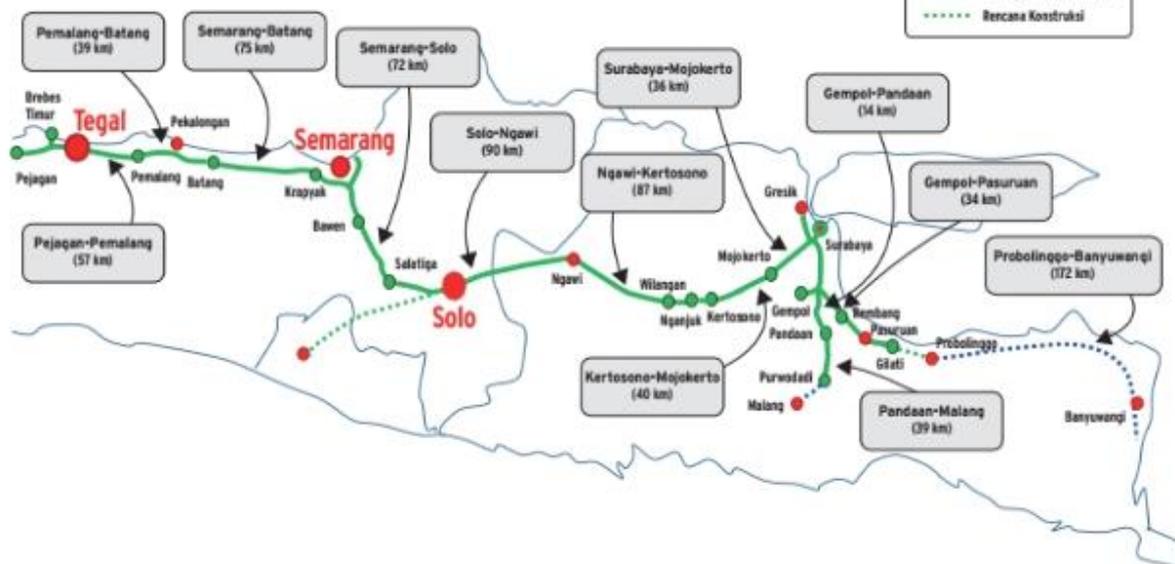
Dia menuturkan bahwa penyediaan terminal di dalam TIP perlu didasarkan pada hasil kajian yang matang.

Fungsi terminal di dalam TIP, lanjutnya, mengharuskan pengelola membuat akses untuk mobilitas penumpang ke luar tol, sedangkan tidak semua TIP memiliki akses jalan bukan tol.

"Menurut saya, harus ada kajian yang betul, tidak ujung-ujug. Di samping itu, pemerintah kan membuat terminal bagus-bagus, kan sayang [kalau tidak digunakan]," tuturnya.

Saat ini, Astra Infra berpartisipasi di empat ruas Trans Jawa dengan panjang 302 kilometer. Keempat ruas itu yakni Tangerang—Merak, Cikopo—Palimanan, Semarang—Solo, dan Jombang—Mojokerto.

## Jalan Tol Trans-Jawa (Jawa Tengah-Jawa Timur)



Judul	<b>Proses Uji Kompetensi Dipermudah</b>	Tanggal	Jumat, 22 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional bakal menerapkan uji kompetensi jarak jauh guna meningkatkan jumlah tenaga ahli konstruksi bersertifikat. Ketua LPJK Nasional Ruslan Rivai mengatakan bahwa Lembaga tersebut bakal menggandeng perguruan tinggi untuk menyusun bank soal yang akan menjadi bahan uji kompetensi tenaga ahli. Proses uji kompetensi jarak jauh ini diharapkan membuat proses sertifikat tenaga ahli konstruksi lebih ringkas.		

## ▶ SERTIFIKASI PEKERJA KONSTRUKSI

# Proses Uji Kompetensi Dipermudah

Bisnis, PAMULANG — Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional bakal menerapkan uji kompetensi jarak jauh guna meningkatkan jumlah tenaga ahli konstruksi bersertifikat.

Ketua LPJK Nasional Ruslan Rivai mengatakan bahwa lembaga tersebut bakal menggandeng perguruan tinggi untuk menyusun bank soal yang akan menjadi bahan uji kompetensi tenaga ahli. Proses uji kompetensi jarak jauh ini diharapkan membuat proses sertifikasi tenaga ahli konstruksi

lebih ringkas.

"Kami akan MoU [memorandum of understanding] dengan Politeknik Negeri Jakarta, dia yang akan generate bank soal tadi," ujarnya kepada *Bisnis* di sela acara Indonesia Construction Technology Expo 2019, Kamis (21/3).

Ruslan mengakui bahwa jumlah tenaga ahli bidang konstruksi yang memiliki sertifikat masih minim.

Berdasarkan data LPJK yang diakses *Bisnis*, Kamis (21/3), jumlah tenaga ahli bersertifikat di Indonesia mencapai 196.017,

Jumlah tersebut terdiri atas 82.554 tenaga ahli muda, 105.844 tenaga ahli madya, dan 7.619 tenaga ahli utama.

Menurut Ruslan, sertifikasi tenaga ahli amat penting karena menjadi amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi. Beleid itu menyebutkan bahwa pengguna jasa konstruksi hanya bisa merekrut atau menggunakan keahlian tenaga kerja yang sudah memiliki sertifikat. Selain itu, sertifikat keterangan ahli (SKA) memberi peluang remunerasi lebih tinggi

bagi tenaga kerja.

Di samping itu, sertifikasi tenaga ahli juga bisa berperan dalam perencanaan proyek infrastruktur yang lebih akurat.

Ruslan memberi contoh beberapa negara sudah memiliki sistem untuk memproyeksi kebutuhan tenaga ahli di sebuah proyek dengan nilai tertentu.

### DI LAPANGAN

Di sisi lain, LPJKN juga berniat menggenjot sertifikasi tenaga terampil lewat pelatihan di lapangan

atau *on site* di daerah.

Menurutnya, proses sertifikasi tenaga terampil akan lebih mudah karena sebagian besar memiliki kompetensi yang cukup untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi.

"Kita datang saja ke lokasi. Kalau ada yang belum memiliki sertifikat, kita observasi. Kalau dia dirasa mampu, kita berikan sertifikat dalam bentuk digital," tuturnya.

Secara umum, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat menargetkan sertifikasi tenaga kerja konstruksi sebanyak

512.000 sepanjang 2019.

Para pemangku kepentingan di industri jasa konstruksi seperti kontraktor, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah juga dilibatkan untuk mencapai target tersebut.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa kementerian bakal menanggung pendanaan untuk sertifikasi 212.000 tenaga kerja.

Sementara itu, sertifikasi 300.000 tenaga kerja merupakan kolaborasi Kementerian PUPR, LPJKN, pemerintah daerah, dan para kontraktor.

(Rohi Madani)

Judul	Mencoba Berdamai Dengan Bencana	Tanggal	Jumat, 22 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 10)		
Resume	Letak Indonesia berada di tiga lempeng tektonik dunia dan berada di cincin api pasifik dengan 127 gunung menyebabkan tidak ada kabupaten atau kota yang bebas dari ancaman bencana dengan lebih dari 254 juta penduduk terpapar resiko bencana sedang dan tinggi. Hampir setiap tahun Indonesia mengalami bencana alam, seperti gempa bumi, erupsi, dan tsunami. Tidak hanya penanganan pascabencana yang kini diperluka. Tindakan preventif sebagai upaya untuk mengurangi korban dan kerugian pun penting untuk dilakukan.		

Berada dalam kawasan *ring of fire* atau cincin api membuat Indonesia begitu dekat dengan potensi bencana alam. Dalam waktu 6 bulan ke belakang, beberapa kali bencana besar melanda. Dimulai dari gempa beruntun di Lombok, gempa dan tsunami Palu, tsunami Selat Sunda, hingga teranyar banjir bandang di Sentani, Papua.

redaksi@bisnis.com

**L**etak Indonesia berada di antara tiga lempeng tektonik dunia dan berada di cincin api pasifik dengan 127 gunung menyebabkan tidak ada kabupaten atau kota yang bebas dari ancaman bencana dengan lebih dari 254 juta penduduk terpapar resiko bencana sedang dan tinggi.

Hampir setiap tahun, Indonesia mengalami bencana alam, seperti gempa bumi, erupsi, dan tsunami. Tidak hanya penanganan pascabencana yang kini diperlukan. Tindakan preventif sebagai upaya untuk mengurangi korban dan kerugian pun penting untuk dilakukan.

Presiden Joko Widodo juga telah menyatakan bahwa pemerintah dan legislatif sepakat untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi edukasi dan mitigasi bencana. Jokowi mengingatkan agar seluruh perangkat pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam karena Indonesia berada di kawasan cincin api.

Menurut catatan *Bisnis*, pada tahun lalu pemerintah sudah menggelontorkan dana untuk tiga bencana besar senilai Rp7,3 triliun. Khusus untuk tahun ini, pemerintah menganggarkan dana untuk tanggap bencana senilai Rp15 triliun.

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terpuruk dengan runtutan bencana alam yang terjadi. Kepercayaan calon wisatawan khususnya yang berasal dari mancanegara mulai menurun lantaran beberapa titik bencana merupakan destinasi pariwisata. Tidak dapat

disangsikan lagi, sektor pariwisata memang sangat sensitif terkait dengan persoalan keselamatan (*safety*) dan keamanan (*security*).

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata Guntur Sakti mengatakan, pihaknya fokus pada tiga hal terkait dengan mitigasi bencana khususnya yang berkaitan dengan pariwisata, yaitu implemen-tasi regulasi yang sudah ada secara tegas. Dia mencontohkan zona aman berada dalam radius 100 meter dari garis pesisir pantai guna alasan keamanan.

"Sebagian besar destinasi kita berada di wilayah pesisir pantai. Zona 100 meter dari garis pantai sudah diamankan dalam undang-undang sampai di peraturan daerah di kabupaten/kota yang bersangkutan. Di sini perlu ada *law enforcement* tentang regulasi yang sudah ada itu," tegas Guntur.

Selain implementasi regulasi, Kementerian Pariwisata bersama para *stakeholder* terkait seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga aktif dalam memanfaatkan teknologi yang ada khususnya terkait dengan upaya peringatan dini atau *early warning system*. Proses edukasi pun dinilai tidak kalah penting dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mitigasi kebencanaan.

"Kami sekarang *concern* untuk mengembangkan *sustainable tourism* [pariwisata berkelanjutan] yang merupakan salah satu amanah dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 14/2016 tentang bagaimana membangun destinasi pariwisata berbasis bencana," ujarnya.

konsep 3P (*People, Planet, Prosperity*) dan Tata Kelola.

Valerina Daniel, Ketua Tim Sekretariat Nasional Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan, mengatakan bahwa salah satu upaya untuk mengenalkan pariwisata keberlanjutan adalah dengan mengadakan Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) yang telah diakui oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO).

"Dalam penilaian pilar tata kelola ada indikator terkait *crisis and emergency management*, di mana pihak pengelola destinasi wajib membuat strategi termasuk penanganan bencana, pelatihan terhadap petugasnya dan mengkomunikasikannya ke masyarakat," ujar Valerina.

Akurasi jurnalis dalam memberitakan bencana alam yang terjadi pada suatu wilayah pun dinilai akan sangat membantu mengurangi dampak bencana tersebut pada sektor pariwisata. Berbagai bencana alam mulai dari erupsi gunung, gempa bumi, dan tsunami yang terjadi di destinasi pariwisata Tanah Air belakangan ini memang berdampak besar terhadap sektor pariwisata, khususnya turunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan perolehan devisa.

Saat terjadi bencana, media ramai memberitakan yang biasanya diikuti dengan *travel advice* dari negara sumber wisatawan mancanegara. Media dituntut untuk cepat dan akurat dalam pemberitaan terkait dengan bencana. Dengan demikian diharapkan bisa mengurangi dampak negatif yang dihadapi oleh sektor pariwisata.

Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia atau Association of Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Nusa Tenggara Barat Dewanto Umbu Joka menuturkan, dalam kejadian gempa Lombok pada 17 Maret 2019, pihaknya harus mengklarifikasi informasi yang didapat oleh rekanan agen Malaysia terkait dengan jumlah korban meninggal akibat informasi yang diterima oleh media lokal setempat yang kurang tepat.

"Mereka bilang ada 40 orang Malaysia yang meninggal, padahal sebenarnya yang 40 orang itu jumlah total wisatawan yang terjebak di air terjun dan dua orang warga negara Malaysia yang menjadi korban meninggal. Informasi seperti ini jangan sampai salah, bisa merugikan," ujar Dewanto.

riwisata dalam menangani wisatawan dalam kondisi darurat memang perlu ditingkatkan. ASITA NTB mengecek langsung agen perjalanan yang membawa rombongan wisatawan dari Malaysia tersebut.

Dewanto menemukan bahwa rombongan wisatawan Malaysia menggunakan jasa *tour guide* atau pemandu wisata yang berada di bawah koperasi transportasi di Lombok dan bukan menjadi bagian dari agen travel yang berada di bawah naungan ASITA NTB.

"Agen perjalanan yang tidak terdaftar secara resmi akan merugikan sektor pariwisata Lombok dan juga wisatawan yang datang lantaran kualitas pelayanan dan pertanggungjawaban yang berbeda dengan agen travel yang resmi," tuturnya.

Dia melanjutkan, agen perjalanan resmi memiliki standar pelayanan yang profesional. Pelayanan tersebut termasuk melakukan kesigapan dalam menangani ketika terjadi kondisi darurat atau bencana. Selain itu, agen perjalanan resmi juga akan memetakan objek destinasi yang dinilai sesuai dengan calon wisatawan, termasuk mengecek terkait dengan standar keamanan dan keselamatan di objek destinasi wisata.

Menurut Dewanto, Pemerintah Provinsi NTB harus bisa menertibkan jasa biro perjalanan wisata yang tidak profesional dan memberikan sosialisasi mitigasi bencana bagi insan pariwisata di Lombok.

"Mitigasi ini sangat penting, kalau ada kejadian (bencana) jadi tahu apa yang harus kita lakukan," ujarnya.

Senada dengan Dewanto, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB Ainuddin juga menyatakan bahwa masih minimnya standar profesionalitas para pemandu wisata yang ada di Pulau Lombok. Salah satunya dengan banyaknya pemandu wisata tanpa lisensi yang menawarkan jasa.

"Mestinya secara regulasi itu diperketat. Kalau dilonggarkan seperti ini kita tidak akan pernah maju, kita akan rusak dengan orang kita sendiri. Sekarang ini saatnya harus ada tindakan tegas dari dinas terkait untuk adakan evaluasi terhadap oknum yang mengaku-aku sebagai travel agent," ujarnya.

Selama ini, menurutnya,

proses membentuk agen perjalanan dinilai terlalu mudah. Berbekal akta notaris, bisnis tersebut bisa mulai dijalankan. Namun, tidak ada evaluasi dan pengawasan yang dilakukan terhadap agen perjalanan tersebut. Hal inilah yang membuat banyak pihak memanfaatkan celah tersebut.

"Sekarang ada sertifikasi tapi sejauh mana [itu bisa bermanfaat dan diterapkan]. Tidak hanya isi formulir saja tanpa adanya penilaian yang bagus terkait sertifikasi usaha pariwisata," papar Ainuddin.

## SECARA SWADAYA

Sadar lokasi tempat mereka mencari nafkah merupakan daerah bencana, Pengelola Desa Wisata Kerujuk yang berlokasi di Desa Pemenang Barat, kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara pun proaktif untuk melengkapi diri dengan pengetahuan dan informasi terkait dengan tanggap bencana. Bagaimana tidak, pascagempa Lombok 2018 nyatanya membuat sumber ekonomi mereka lesu kendati hanya 30% area yang terdampak bencana.

Banyak *homestay* yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian warga rusak berat. Selain itu, beberapa fasilitas penunjang seperti kolam, toilet, dan mushala pun kondisinya sudah tidak bisa digunakan lagi akibat gempa.

Lukmanul Hakim, pengelola Desa Wisata Kerujuk, telah melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam upaya melengkapi destinasi wisatanya dengan fasilitas mitigasi.

"Bukan hanya berbicara terkait pembangunan dan pengembangan destinasi secara fisik saja, tetapi juga bersinergi untuk memberikan pemahaman terkait dengan mitigasi bencana. Apa yang harus dilakukan kepada para wisata ketika terjadi bencana, di mana lokasi titik kumpul, dan ke arah mana harus melakukan evakuasi," ujarnya.

Kendati belum sempurna, Lukman bersama para pengelola Desa Wisata Kerujuk terus mengupayakan agar destinasi wisata tersebut bisa lebih ramah menghadapi kondisi alam yang lekat dengan daerah setempat. (16)

## Peta Destinasi Wisata &

Judul	<b>MA Tolak Permohonan PUPR</b>	Tanggal	Jumat, 22 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 11)		
Resume	Mahkamah Agung menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Kementerian PUPR terkait dengan kewajiban pembayaran kepada PT Adhi Karya Tbk. Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Bypass Banjarmasin- Simpang Handil Bakti-Marabahan-Pelabuhan Trisakti-Liang Anggang-Martapura-Desa Tungkup-Batas Kota Rantau di Kalimantan Selatan wajib melakukan pembayaran sebesar Rp27,6 miliar kepada BUMN karya itu.		

► PEMBATALAN PUTUSAN

## MA Tolak Permohonan PUPR

Bisnis, JAKARTA—Mahkamah Agung menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Kementerian PUPR terkait dengan kewajiban pembayaran kepada PT Adhi Karya Tbk.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bypass Banjarmasin—Simpang Handil Bakti—Marabahan—Pelabuhan Trisakti—Liang Anggang—Martapura—Desa Tungkup—Batas Kota Rantau di Kalimantan Selatan wajib melakukan pembayaran sebesar Rp27,6 miliar kepada BUMN karya itu.

Putusan itu diambil melalui musyawarah hakim yang terdiri dari Syamsul Ma'arif yang didampingi oleh I Gusti Agung Sumanatha dan Sudrajad Dimiyati. Salinan putusan itu dipublikasikan pada Rabu (21/3).

Kepala Biro Pusat Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra Saleh, yang dimintai tanggapan terkait dengan putusan yang dibacakan pada November 2018 itu, mengaku belum mendapatkan informasi tentang hal tersebut.

"Saya cek ke Biro Hukum terlebih dahulu untuk memastikan informasi ini," ujarnya, Kamis (21/3).

Begitu juga dengan Budi Harto, Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk., hingga berita ini diturunkan belum merespons permintaan tanggapan terkait dengan putusan tersebut, baik melalui pesan singkat maupun telepon.

Berdasarkan dokumen persidangan, putusan itu berkaitan erat dengan pelaksanaan pengerjaan jalan sesuai dengan kontrak pengerjaan paket EKS-01 Martapura—Desa Tungkup yang ditandatangani oleh PPK dan Adhi Karya Regional V pada November 2010 dengan nomor kontrak 2-36/EKS-01/NR/A/L002/2010.

Sementara itu, perkara pembayaran tersebut bermula ketika Adhi Karya mengirimkan surat dengan dengan Nomor 234/EINRIP-EKS01/AK.V/XII/2013 pada 19 Desember 2013.

Surat itu berisikan klaim pembayaran karena adanya penambahan waktu pengerjaan dengan total tagihan mencapai Rp29 miliar, tidak termasuk pajak penghasilan (PPh).

Adapun, surat tersebut ditujukan kepada kontraktor supervisi, dan ditanggapi dengan surat bernomor RSC/ENG/CR/EKS-01/0.03/2014 yang menolak klaim pembayaran tersebut dengan alasan *notice claim* telah melewati batas waktu 28 hari sejak kejadian yang dapat menimbulkan klaim.

Selanjutnya, *detailed claim* juga dianggap telah melewati batas waktu yang ditentukan yakni 42 hari.

Setelah itu, terjadi korespondensi antara kedua belah pihak hingga pada 28 Maret 2014, konsultan supervisi menyatakan sikap final yang menolak permohonan klaim tersebut.

Adhi Karya kemudian membawa persoalan tersebut ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang ber Kantor di Mampang, Jakarta Selatan. Setelah melalui serangkaian persidangan, pada 16 November 2017 BANI memutuskan bahwa PPK telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dan mesti membayar Rp27,6 miliar ke Adhi Karya.

Majelis hakim dalam perkara pembatalan tersebut menolak permohonan pembatalan yang diajukan oleh PPK disertai sejumlah alasan. Salah satunya adalah surat tagihan Adhi Karya kepada PPK dianggap telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata juncto Pasal 4.8 pada kontrak. "Dalil pemohon yang menyatakan klaim biaya bunga bank termohon harus ditolak dengan alasan surat termohon pada 19 Desember 2013 tidak dapat dijadikan dasar dimulainya waktu perhitungan bunga bank, adalah dalil yang sangat tidak relevan dan mengada-ada, karena faktanya, termohon telah menagihkan kerugian-kerugian yang dialami," ujar majelis hakim pada PN Banjarmasin. (M.G. Noviantizal Fernandez)